

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BSM SMK)  
DI KOTA MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**NUR INTAN RAMBE  
NPM. 141801064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan**

**Nama : Nur Intan Rambe**

**NPM : 141801064**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si**

**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 10 November 2016**

---

---

**Nama : Nur Intan Rambe,**

**NPM : 141801064**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : *Drs. Usman Tarigan, MS*  
**Sekretaris** : *Isnaini, SH, M.Hum*  
**Pembimbing I** : *Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si*  
**Pembimbing II** : *Drs. Kariono, MA*  
**Penguji Tamu** : *Prof. Dr. Badaruddin, M.Si*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya' atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 10 November 2016

Yang menyatakan,



Nur Intan Rambe

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BSM SMK) DI KOTA MEDAN

**Nama** : Nur Intan Rambe  
**N P M** : 141801064  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si  
**Pembimbing II** : Isnaini, SH, M.Hum

Bantuan Siswa Miskin adalah salah satu dari program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Program Bantuan Siswa Miskin berupa bantuan sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program Bantuan Siswa Miskin bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dalam memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan. Program Bantuan Siswa Miskin juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa sehingga dapat meringkankan beban orang tuasiswa. Sasaran atau Penerima Bantuan Siswa Miskin adalah siswa yang orang tuanya penerima Kartu Perlindungan Sosial, siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin Khusus untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, orang tua siswa terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan, siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, atau yatim piatu, siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban dari Rumah Tangga Sangat Miskin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan, apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan, mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil wawancara dan pengamatan, ditinjau dari komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan sudah dapat dikategorikan baik.

Kata kunci : implementasi, bantuan siswa miskin

## ABSTRACT

### POOR IMPLEMENTATION OF STUDENT ASSISTANCE PROGRAM VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN MEDAN

**Name** : Nur Intan Rambe  
**N P M** : 141801064  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Supervisor I** : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si  
**Supervisor II** : Isnaini, SH, M.Hum

Help Poor Students are one of the government programs given to the public. Poor Students Assistance Program in the form of a cash assistance given directly to students in accordance with established criteria. Poor Students Assistance Program aims to provide education for poor students in meeting the cost of their needs in the field of education. Poor Students Assistance Program also can be used for financing personal needs of students so that the load can be reduced for students. Goal or Receiver Help Poor Students are students whose parents are recipient Card Social Protection, students who received the cards Prospective Recipient Poor Students Especially for elementary and junior high schools, parents of students enrolled as a Family Hope Program, students in danger of dropping out of school due to financial barriers, students are orphans, fatherless or orphaned, students come from unfortunate victims, disabilities, victims of very poor households.

Formulation of the problem in this research is how the implementation of the Program of Assistance to Poor Students in Vocational High School in the city of Medan, whether the factors that become obstacles in the implementation of the Program of Assistance to Poor Students in Vocational High School in the city of Medan. While the goal to be achieved in this research is to know the implementation of the Help Poor Students in Vocational High School in the city of Medan. determine the factors that become obstacles in the implementation of the Program of Assistance to Poor Students in Vocational High School in Medan.

Based on the results of research conducted from interviews and observations in terms of communication, sources, trends and bureaucratic structures it is concluded that the implementation of the program of assistance to poor students of vocational high schools in Medan can already be categorized as good.

**Keywords:** implementation, help poor students

## KATA PENGANTAR

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, MSi, sebagai Pembimbing I dalam penyusunan Penelitian Tesis ini sekaligus Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Kariono, MA sebagai sebagai Pembimbing II dalam penyusunan Penelitian Tesis ini sekaligus Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Publik.
5. Kedua Orang Tua, Suami dan Anak-Anak tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S2.

Medan, Oktober 2016  
Penulis

NUR INTAN RAMBE

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Implementasi Kebijakan.....	11
2.2 Bantuan Siswa Miskin.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
3.1 Bentuk Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisa Data.....	40

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
4.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan .....	42
4.2 Gambaran Umum SMK Negeri 1 Kota Medan .....	60
4.3 Gambaran Umum SMK Negeri 5 Kota Medan .....	63
4.4 Gambaran Umum SMK Negeri 9 Kota Medan .....	66
4.5 Hasil Penelitian .....	69
4.5.1. Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan.....	70
4.5.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan .....	97
4.6 Pembahasan .....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN</b> .....	104
5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Implikasi Kebijakan .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1.</b> Jumlah Penerima Manfaat Program BSM 2008-2014.....	24
<b>Tabel 2.2.</b> Evaluasi ketepatan besaran Bantuan Program BSM yang diterima oleh Siswa .....	30
<b>Tabel 2.3.</b> Kuota Penerima Program BSM 2013 dan 2014 .....	36
<b>Tabel 4.1.</b> Identitas Sekolah SMK Negeri 1 Medan.....	61
<b>Tabel 4.2.</b> Identitas Sekolah SMK Negeri 5 Medan.....	65
<b>Tabel 4.3.</b> Identitas Sekolah SMK Negeri 9 Medan.....	68



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1.</b> Evaluasi BSM terhadap Inclusion & Exclusion Error .....	29
<b>Gambar 2.2.</b> Evaluasi Keberlanjutan Pendidikan berdasarkan Kuantil Pengeluaran .....	31
<b>Gambar 2.3.</b> Rekomendasi Perubahan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Program BSM .....	34
<b>Gambar 4.1.</b> Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Medan .....	49
<b>Gambar 4.2.</b> Kartu Calon Penerima BSM .....	77
<b>Gambar 4.3.</b> Mekanisme Penentuan Calon Penerima BSM .....	78
<b>Gambar 4.4.</b> Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BSM .....	82

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa/peserta didik, tetapi masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa/peserta didik, tetapi masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan

lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 - 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung, maka dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan dasar melalui beberapa program yang diantaranya adalah BOS, PKH, dan BSM.

Bantuan Siswa Miskin termasuk dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan tentang anggaran kompensasi BBM meliputi Bantuan

Langsung Sementara Masyarakat, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan, penyesuaian besaran bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan dan tambahan subsidi bidang transportasi, penyesuaian besaran dan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, dan penyesuaian jumlah raskin (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

BSM adalah salah satu dari program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Program BSM berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar 425 ribu pertahun yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dalam memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan. Program BSM juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa yaitu Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa untuk sekolah sehingga dapat meringkankan beban orang tua siswa (Kemdikbud, 2013).

Sasaran atau Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah siswa yang orang tuanya penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin Khusus untuk SD dan SMP, orang tua siswa terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, atau yatim piatu, siswa berasal

dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Kemendikbud, 2013).

Implementasi program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia ternyata belum bisa dikatakan berhasil, karena permasalahan baru terjadi pada saat setelah disalurkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) ke seluruh Indonesia yaitu terkait rendahnya serapan dana BSM kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah harus bekerja keras untuk mensosialisasikan program BSM, karena permasalahan yang terjadi dapat menghambat pencapaian keberhasilan program BSM.

Ketiadaan biaya untuk mengikuti pendidikan di bangku sekolah kini bukanlah sebuah alasan untuk tidak bisa bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu atau yatim piatu, serta siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari rumah tangga miskin bisa kembali bersekolah dengan program Bantuan Siswa Miskin (Elan Satriawan, 2013).

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah program nasional berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usai sekolah atau siswa dari semua jenjang pendidikan, mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan miskin. Melalui BSM diharapkan akan memberi akses yang lebih besar kepada anak Indonesia usia sekolah bisa menikmati pendidikan. Berapa pun jumlah anak dalam keluarga, asalkan termasuk jenjang usia sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, berhak mendapatkan BSM dan

berhak bersekolah. Bahkan anak yang putus sekolah pun bisa kembali bersekolah dengan BSM (Elan Satriawan, 2013).

Pemerintah telah meluncurkan BSM melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah dibagikan kepada rakyat miskin, untuk mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Dengan skema ini, rumah tangga miskin yang menerima KPS dan memiliki anak usia sekolah berhak untuk mendapatkan program BSM. Program tersebut ditujukan kepada 16,6 juta Anak Usia Sekolah yang berasal dari 15,5 juta rumah tangga penerima KPS, yang berhak mendapatkan BSM adalah anak usia sekolah dari jenjang SD/SMP/SMA/SMK serta MI/MTs/MA (Elan Satriawan, 2013).

Sumatera Utara dari total 746.220 rumah tangga penerima KPS, sebanyak 1.041.608 orang anak usia sekolah berhak mendapatkan program BSM. Untuk mendapatkan BSM, rumah tangga penerima KPS cukup membawa KPS ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program BSM, saat membawa KPS ke sekolah, jangan lupa disertai salah satu bukti tambahan seperti Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari kepala RT/RW/Dusun/Setara jika Kepala Keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga atau Nama Kepala Keluarga tidak sama dengan nama Kepala Keluarga di Kartu Keluarga, besaran manfaat BSM yang akan diterima adalah sebesar Rp 225 ribu per semester untuk SD/MI, Rp 375 ribu per semester untuk SMP/ MTS, dan Rp 500 ribu per semester untuk SMA/SMK/MA (Elan Satriawan, 2013).

Terkait mekanisme penyaluran BSM setelah rumah tangga penerima KPS mendaftarkan anaknya, Kepala Sekolah/Madrasah akan membuat rekapitulasi penerima BSM di sekolah/madrasah masing-masing, dan pada pertengahan Agustus dan akhir September 2013, akan dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program BSM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). Setelah penetapan dilakukan, maka pada akhir Agustus dan akhir September/Awal Oktober, dana BSM dapat diambil di Lembaga Penyalur, dengan membawa dokumen pendukung seperti Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah, serta bukti identitas lain, seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor atau Ijazah. Selain melalui mekanisme KPS, Kepala Sekolah/Madrasah bersama Komite sekolah/madrasah dapat mengusulkan penerima BSM untuk dimasukkan kedalam Formulir Rekapitulasi Usulan. Siswa (calon penerima BSM diluar mekanisme KPS ini setidaknya harus memenuhi syarat bahwa orangtua siswa terdaftar sebagai Peserta Program Keluarga Harapan, siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu atau yatim piatu, serta siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari rumah tangga miskin atau memiliki 3 (tiga) saudara yang berusia di bawah 18 tahun (Elan Satriawan, 2013).

Di Kota Medan Program Bantuan Siswa Miskin masih mengalami hambatan yang mengakibatkan penyaluran tidak terealisasi dengan maksimal. Anggota DPRD Kota Medan meminta Dinas Pendidikan Medan untuk segera melakukan pendataan terhadap siswa miskin di Medan. Sebab, tidak adanya database siswa miskin telah

membuat penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak terealisasi dengan maksimal. Masih banyak siswa miskin di Medan yang tidak memperoleh bantuan tersebut (Harian Medan Bisnis, 2013).

Kita sangat menyesalkan lambatnya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Medan untuk memperoleh database yang jelas berapa jumlah siswa miskin di Medan ini. Pemberian beasiswa dalam bentuk uang tunai sudah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)2013 lalu, yakni sebesar Rp 11 miliar. Jadi, tidak ada alasan bagi Dinas Pendidikan Kota Medan untuk belum memiliki database jumlah siswa kurang mampu di Kota Medan (Komisi B DPRD Medan, Yahya Payungan Lubis kepada Medan Bisnis, 2013)

Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Medan diminta agar segera menyerahkan data siswa penerima seragam sekolah dan calon penerima beasiswa tersebut. Proses pendataan siswa yang panjang membuat proses penycrapan dana BSM menjadi rendah. Proses penyaluran BSM masih berbeda setiap. Proses pendataanya sangat panjang dan datanya berubah-ubah. Data siswa penerimanya bisa bersumber dari keluarga penerima kartu perlindungan sosial (KPS), bisa juga data siswa miskin tahun sebelumnya. Bisa juga data baru yang diusulkan dari sekolah.

Di Kota Medan kuota untuk SMP sebanyak 18.000 siswa. Hanya saja, hingga saat ini kuota itu belum terpenuhi sehingga pendataannya itu diawali dari penerima kartu KPS itu, lalu kemudian datanya dibawa ke sekolah, lalu sekolah membawa ke Dinas, dan Dinas membawa datanya ke Jakarta untuk diverifikasi. Selain itu, itu

masih bisa juga diusulkan kalau seandainya keluarganya tidak dapat kartunya. Jadi untuk itu prosesnya sangat panjang, setelah datanya sesuai dan akurat, maka diberitahukan kepada sekolah untuk menghimbau ke siswanya untuk pengambilan bantuan itu di kantor Pos. Untuk pengambilan dananya juga diharuskan langsung siswa.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Umum Dinas Pendidikan Kota Medan (Marasutan Siregar, 2013) menyebutkan bahwa pihaknya masih merampungkan pendataan siswa penerimanya. Lambatnya proses penyaluran karena verifikasi yang masih terus terjadi. Saat ini staf pada Dinas Pendidikan terus berusaha untuk merampungkan pendataan siswa miskin untuk segera dikirimkan ke Jakarta agar bisa segera disetujui dan disalurkan dananya.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan, jumlah siswa miskin di Sumut sebanyak 1.041.608 orang. Dengan rincian SD/MI sebanyak 599.975 orang dengan dana BSM Rp 450.000 per siswa per tahun pelajaran; SMP/MTs sebanyak 257.516 orang dengan dana BSM Rp 750.000 per siswa per tahun, dan SMA/SMK/MA 184.117 siswa dengan jumlah Rp1.000.000 per siswa per tahun.

Bantuan Siswa Miskin berbeda dengan beasiswa yang berkaitan dengan prestasi siswa. Bantuan ini diberikan karena situasi perekonomian keluarganya yang termasuk keluarga miskin dan rentan miskin. BOS diberikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan BSM diberikan untuk mendukung tunjangan pendidikan agar prestasi pendidikan siswa bisa meningkat.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi Program Bantuan Siswa Miskin di Kota Medan khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan dalam mendukung dan menunjang pendidikan agar prestasi pendidikan siswa miskin di Kota Medan bisa meningkat, maka judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan?.
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan?.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Publik terutama dalam implementasi kebijakan publik.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Medan dalam mendukung dan menunjang pendidikan agar prestasi pendidikan siswa miskin di Kota Medan bisa meningkat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye(1981:1) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutif Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik meenetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Sipa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebjakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementasion): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

## 2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Afan Gaffar, 2009: 295).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

### 2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,1997:71-78 ).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan sosialisasi tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994 : 144).

#### **2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan**

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya,

maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

### 2.3. Bantuan Siswa Miskin

#### 2.3.1. Pengertian Bantuan Siswa Miskin

Apa yang dimaksud dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)? Mengapa disebut sebagai “bantuan” dan apa bedanya dengan “beasiswa”? Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.
2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun
3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan

kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi (<http://www.tnp2k.go.id/>). Besarnya anggaran untuk beasiswa miskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

### 2.3.2. Penyaluran BSM dan Sumber Pembiayaan

Program BSM dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian yang berbeda, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekolah reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan BSM bagi siswa yang berskolah di Madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sumber dana semua bantuan ini adalah dari APBN. Alokasinya tertuang dalam DIPA di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DIPA Kementerian Agama.

Tabel 2.1. Jumlah Penerima Manfaat Program BSM 2008-2014

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penerima Program BSM								Jumlah Manfaat Program BSM per siswa per tahun pelajaran
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	APBN P 2013	2014	
1	SD	898.400	1.796.800	2.277.039	2.043.000	1.530.105	1.530.105	8.002.061	6.046.921	430.000
2	SMP	499.105	923.647	891.129	998.212	1.295.450	1.246.713	2.803.187	1.169.890	730.000
3	SMA	732.620	1.477.791	613.967	306.121	505.290	561.813	1.020.972	550.000	1.000.000
4	SMK					617.576	629.587		425.093	
<b>Kemendikbud</b>		<b>2.130.125</b>	<b>2.898.258</b>	<b>3.482.135</b>	<b>3.344.336</b>	<b>3.948.621</b>	<b>3.958.731</b>	<b>12.652.723</b>	<b>9.191.844</b>	
1	MI	358.492	645.556	714.443	750.000	750.000	1.436.228	1.436.228	819.386	450.000
2	MTs	274.023	544.841	645.033	600.000	600.000	950.291	950.291	785.891	730.000
3	MA	204.922	316.292	382.903	400.000	400.000	332.725	307.720	354.929	1.000.000
<b>Kemenag</b>		<b>837.441</b>	<b>1.506.499</b>	<b>1.742.578</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.779.248</b>	<b>2.779.248</b>	<b>1.939.754</b>	
<b>Total</b>		<b>2.967.566</b>	<b>4.404.757</b>	<b>5.224.713</b>	<b>5.094.336</b>	<b>5.698.621</b>	<b>6.737.979</b>	<b>15.431.971</b>	<b>11.131.608</b>	

Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

### 2.3.3. Penerima BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi

Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Penerima dana Beasiswa Bakat dan Prestasi adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik/non-akademik pada SD, SMP, SMA atau SMK yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Penerima Program BSM yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dihitung berdasarkan proporsi populasi murid di masing-masing kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut.

1. Madrasah Ibtidaiyah : 750.000 siswa
2. Madrasah Tsanawiyah : 600.000 siswa
3. Madrasah Aliyah : 400.000 siswa

### 2.3.4. Kriteria dasar penentuan penerima BSM

Kriteria dasar penentuan penerima Program BSM Kemendikbud adalah siswa miskin adalah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

Kriteria penerima BSM untuk Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin
3. Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya
5. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu
6. Siswa yang berasal dari panti asuhan
7. Siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PKH dari Rumah Tangga Sangat Miskin dan siswa dari program keahlian pertanian (SMK)

Kriteria dasar penentuan penerima Program BSM Kemenag adalah Penerima BSM adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), siswa Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan siswa Madrasah Aliyah negeri dan swasta kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas).

Adapun kriteria siswa penerima BSM sebagai berikut:

- a. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) /Kartu BSM yang telah terdaftar sebagai penerima BSM tahun 2013 (APBN-P 2013);
- b. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum terdaftar dan belum menerima BSM Tahun 2013;

Selain kriteria di atas dan apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Orangtua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau;
2. Siswa yang berasal dari Panti sosial/Panti Asuhan yang dikelola oleh Kementerian Sosial
3. Siswa korban musibah bencana alam
4. Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau;
5. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;
6. Yatim dan/atau Piatu, atau

7. Pertimbangan lain (misal kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

Pemanfaatan dana BSM adalah untuk pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah, uang saku siswa untuk sekolah. Dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM :

1. Berhenti sekolah
2. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain
3. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal
4. Mengundurkan diri
5. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin

Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM serta memilih siswa penggantinya. Nama siswa pengganti tersebut harus segera dikirimkan kepada lembaga penyalur melalui SK Pengganti.

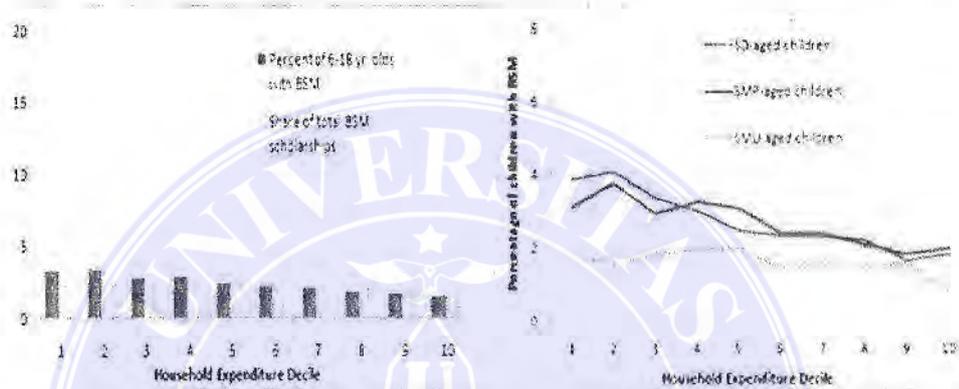
### **2.3.5. Hambatan-hambatan pelaksanaan BSM**

Beberapa hasil dari evaluasi dan studi lanjutan terhadap pelaksanaan Program BSM menunjukkan kelemahan dari program, yaitu terkait ketepatan penetapan sasaran BSM dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima BSM dan jumlah beasiswa yang kurang memadai.

Gambar 2.1. Evaluasi BSM terhadap Inclusion & Exclusion Error

## KESALAHAN INKLUSI & EKSKLUSI

kesalahan inklusi & eksklusi muncul sebagai hasil langsung dari sistem targeting saat ini yang masih berbasis sekolah, dan bukannya berdasarkan penggolongan tingkat kemiskinan rumah tangga



Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

Gambar 2.1 menunjukkan akurasi dari penetapan sasaran penerima Program BSM masih lemah dimana ditemukan banyak penerima BSM yang bukan berasal dari keluarga/rumah tangga miskin (*inclusion error*) dan banyak siswa dari keluarga/rumah tangga miskin tidak menerima manfaat BSM (*exclusion error*).

Ketepatan besaran bantuan Program BSM dalam menutupi biaya lain terkait pendidikan sangat penting dalam memberikan insentif kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk tetap menyekolahkan anaknya di jalur formal. Hingga tahun 2012, besaran BSM belum dapat menutupi pengeluaran lain terkait pendidikan. Hasil evaluasi Sekretariat TNP2K berdasarkan data Susenas 2009 menunjukkan bahwa

manfaat tersebut hanya dapat menutupi sekitar kurang lebih 30 atau 40 persen dari total biaya personal pendidikan yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga miskin.

**Tabel 2.2. Evaluasi ketepatan besaran Bantuan Program BSM yang diterima oleh Siswa**

Jenjang Pendidikan	Biaya Operasional Pendidikan (Rp)*	Biaya Personal Pendidikan (Rp)	Nilai Manfaat BSM di 2012 (Rp. per siswa per Tahun Pelajaran)
SD	210,000	910,000	360,00
SMP	390,000	1,390,000	550,000
SMA	940,000	1,660,000	750,000

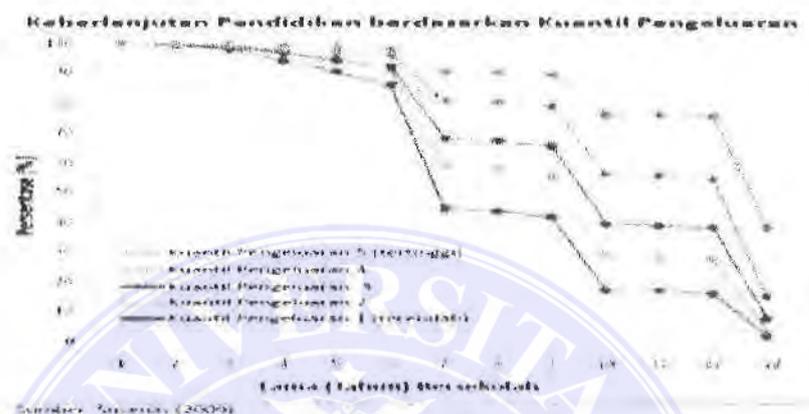
Catatan: \* Biaya Operasional Pendidikan telah diberikan di dalam Program BOS

Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

### 2.3.6. Ketepatan Waktu Penyaluran Manfaat BSM

Ketepatan waktu penyaluran Program BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa/peserta didik dari keluarga miskin (antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan). Selama pelaksanaan Program BSM hingga awal tahun 2012, manfaat Program BSM baru diterima oleh siswa pada bulan Maret dan September sedangkan penyaluran manfaat BSM di bulan Juni sangat rendah. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K menemukan bahwa waktu/masa kritis siswa dimana siswa/keluarga/rumah tinggal berada pada saat akhir tahun pelajaran di bulan Mei hingga Juli dan pada awal Tahun Pelajaran di bulan Juli terutama saat siswa transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya (seperti dari SD/MI ke SMP/MTs; dari SMP ke SMA/SMK/MA).

**Gambar 2.2. Evaluasi Keberlanjutan Pendidikan berdasarkan Kuantil Pengeluaran**



Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

### 2.3.7. Kebijakan Perbaikan Pelaksanaan Program BSM

Berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan Program BSM pada periode sebelum 2012, Sekretariat TNP2K kemudian mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program BSM kepada Kemendikbud dan Kemenag sebagai pelaksana Program BSM. Rekomendasi perbaikan program dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk:

1. Memastikan keberlanjutan pendidikan siswa penerima program BSM dari keluarga/rumah tangga miskin antar kelas dan jenjang pendidikan terutama bagi siswa/peserta didik yang berada pada periode transisi.
2. Memastikan adanya peningkatan cakupan penerima BSM dan peningkatan nilai/manfaat BSM secara bertahap dimana diharapkan Program BSM dapat menjangkau lebih banyak siswa miskin dan rentan maupun anak yang belum

dan tidak lagi bersekolah. Nilai/manfaat Program BSM juga terus dipastikan ada peningkatan agar kebutuhan personal pendidikan siswa/peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Tahapan pelaksanaan rekomendasi kebijakan ini dilakukan sesuai dengan karakteristik pelaksanaan Program BSM. Pelaksanaan Program BSM memiliki karakteristik program yang cukup kompleks dan unik dari segi pelaksanaan secara kebijakan, teknis maupun administratif. Salah satu contoh adalah program ini dilaksanakan oleh beberapa Direktorat Pelaksana teknis di dua Kementerian yang berbeda (Kemdikbud dan Kemenag), yaitu Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pendidikan SMK, dan Direktorat Pendidikan Madrasah.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh Sekretariat TNP2K untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan Program BSM, direncanakan secara bertahap melalui proses advokasi, lokakarya teknis serta kegiatan koordinasi (baik formal maupun informal) yang intensif sejak awal tahun 2012 dengan Kemdikbud dan Kemenag.

Advokasi dan koordinasi yang terus dilakukan oleh Sekretariat TNP2K penting untuk memastikan agar kedua Kementerian tersebut memiliki komitmen dan pemahaman yang sama terutama mengenai pentingnya perbaikan ketepatan sasaran program, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran, agar di dalam rekomendasi kebijakan perbaikan program, kedua Kementerian dapat berkontribusi

dan turut serta secara aktif dalam memantau dan mengevaluasi efektifitas perbaikan program dengan baik.

Reformasi yang pertama kali dilakukan oleh TNP2K adalah melakukan perbaikan penetapan sasaran BSM. Perbaikan ini dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah pemanfaatan informasi yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sumber data calon siswa penerima BSM. Mekanisme yang kedua terkait dengan proses alur usulan siswa calon penerima BSM dari tingkat sekolah/madrasah hingga ke tingkat pusat.

Sasaran dari penerima program BSM dan meningkatkan cakupan penerima BSM yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin, dengan memanfaatkan informasi dari BDT dan melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM (selanjutnya disebut sebagai Kartu BSM) di tahun 2012 dan di tahun 2013 – melalui pengiriman Kartu Perlindungan Sosial/KPS.

Gambar 2.3. Rekomendasi Perubahan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Program BSM



Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

Perbaikan pelaksanaan Program BSM ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pelaksanaan perbaikan Program BSM pada tahun 2012 di fokuskan dan dirancang sebagai upaya untuk membantu meningkatkan keberlanjutan pendidikan dari siswa dari keluarga/rumah tangga miskin yang berada di periode transisi (kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke kelas 7 SMP di bawah Kemdikbud) sebanyak sekitar 281.909 siswa. Metode penetapan sasaran program BSM dimodifikasi dari pemilihan sasaran berdasarkan sekolah menjadi penetapan sasaran program secara langsung kepada siswa/peserta didik yang teridentifikasi dari rumah tangga miskin berdasarkan informasi individu dalam rumah tangga di Basis Data Terpadu dan melalui pengiriman Kartu BSM).

Bersama – sama dengan Direktorat Pembinaan SD dan SMP - Kemdikbud dan juga Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag, tahap kedua dari perbaikan program BSM di rencanakan kembali pada awal tahun 2013, yang awalnya menyasar kurang lebih 670,000 siswa/peserta didik yang berpotensi menjadi penerima BSM di seluruh Indonesia, dengan rincian rencana sasaran 220,000 siswa baru yang akan masuk ke kelas 1 SD dan 450,000 siswa baru kelas 7 SMP/MTs di Tahun Pelajaran (TA) 2013/2014. Namun demikian, sebelum tahap kedua perbaikan Program BSM dapat terlaksana, Pemerintah Indonesia di pertengahan tahun 2013 mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan merelokasi penghematan anggaran menjadi paket kompensasi untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan melalui beberapa program – program bantuan sosial yang selama ini telah ada, termasuk Program BSM, atau yang disebut Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Manfaat dari Program BSM juga ditingkatkan dan cakupan sasaran program juga meningkat untuk siswa/peserta didik di semua jenjang pendidikan (Pendidikan Dasar dan Pendidikan mMenengah - SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MTs).

Pada bulan Juni 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan menyediakan program kompensasi untuk rumah tangga miskin dan rentan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Program Perluasan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P4S) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kemudian diluncurkan di mana khusus untuk Program BSM, anggaran Program BSM bagi Kemdikbud dan Kemenag meningkat melalui proses APBN-P 2013.

Cakupan penerima Program BSM bertambah menjadi 15.4 juta anak – anak usia sekolah (dari 8.7 juta siswa di awal tahun 2013), yang berasal dari 15,5 juta rumah tangga di seluruh Indonesia teridentifikasi sebagai miskin dan rentan berdasarkan informasi dari BDT dan berhak menerima KPS ditambah dengan cadangan sehingga total menjadi 16,6 juta siswa. Rumah tangga dengan anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah dan memiliki KPS/Kartu BSM berhak untuk menerima manfaat Program BSM sebagai bagian dari Program Kompensasi BBM – P4S.

**Tabel 2.3. Kuota Penerima Program BSM 2013 dan 2014**

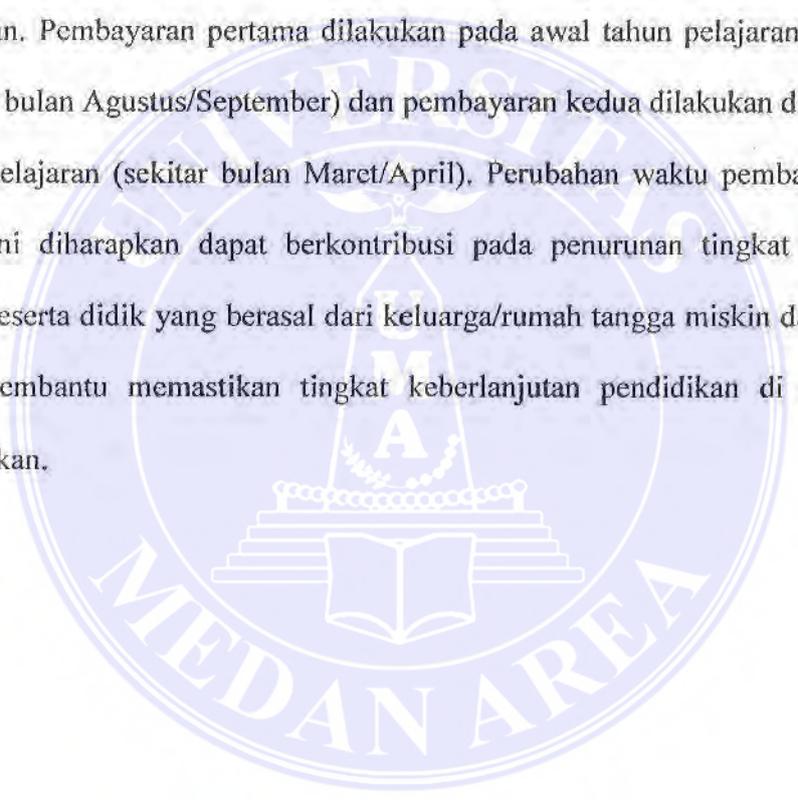
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	2013	2013 (APEN-P 2013)	2014
1	SD	20.975.293	3.530.308	8.062.561	6.046.921
2	SMP	9.843.957	1.246.712	2.603.187	2.189.890
3	SMA	8.087.227	561.832	678.700	550.000
4	SMK		619.882	1.018.185	425.033
<b>Kemdikbud</b>		<b>45.206.387</b>	<b>5.958.731</b>	<b>12.652.723</b>	<b>9.191.844</b>
1	MI	3.583.000	1.436.328	1.436.328	819.336
2	MTs	3.353.000	950.291	870.001	785.491
3	MA	1.150.000	392.729	392.728	354.929
<b>Nonmenag</b>		<b>8.082.000</b>	<b>2.779.248</b>	<b>2.779.248</b>	<b>1.939.756</b>
<b>Total</b>		<b>53.288.387</b>	<b>8.737.979</b>	<b>15.431.971</b>	<b>11.131.600</b>

Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

Selain penambahan cakupan penerima BSM, kompensasi kenaikan harga BBM juga diikuti dengan peningkatan besaran manfaat BSM. Nilai dari manfaat Program BSM meningkat dari Rp380.000 per siswa per tahun pelajaran menjadi Rp450.000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan SD/MI, dan dari Rp550.000 per siswa per tahun menjadi Rp750.000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, nilai/manfaat Program BSM

telah mengalami kenaikan di awal tahun anggaran 2013 yaitu dari Rp750.000 per siswa per tahun, menjadi Rp 1.000.000 juta per siswa per tahun pelajaran.

Reformasi ketiga yang dilakukan seiring dengan berjalannya Program Kompensasi kenaikan BBM adalah perbaikan waktu penyaluran BSM. Penyaluran manfaat BSM dimodifikasi dari sekali menjadi dua kali penyaluran per tahun pelajaran. Pembayaran pertama dilakukan pada awal tahun pelajaran di Semester 1 (sekitar bulan Agustus/September) dan pembayaran kedua dilakukan di Semester ke 2 tahun pelajaran (sekitar bulan Maret/April). Perubahan waktu pembayaran manfaat BSM ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan tingkat drop out dari siswa/peserta didik yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin dan rentan, serta juga membantu memastikan tingkat keberlanjutan pendidikan di setiap jenjang pendidikan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Bentuk Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 9 Kota Medan serta Dinas Pendidikan Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan pada 3 SMK tersebut dikarenakan ketiga SMK tersebut sudah mewakili keseluruhan SMK yang ada di Kota Medan ditinjau dari tahun pendirian, jumlah siswa penerima BSM dan bidang keahlian yang ada di SMK tersebut.

#### 3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik

“snowball” yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan.

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan, subyek informan lainnya didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan, antara lain Dewan Pendidikan Kota Medan 1 orang, Dinas Pendidikan Kota Medan 5 orang, Komite Sekolah 5 orang, Kepala Sekolah 3 orang, Wakil Kepala Sekolah 3 orang, guru 3 orang serta wali murid sebanyak 5 orang. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.
- b. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan khususnya pada SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 9 Kota Medan.

### 3.5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) Di Kota Medan berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi..

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada

hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan berdasarkan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan antara lain: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari semua pihak yang terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan sudah memahami secara benar tentang pelaksanaan program tersebut, baik yang berkaitan dengan substansi maupun implikasi dari penyelenggaraannya.

##### 2. Sumber-Sumber

Dari hasil pengamatan penulis pada 3 SMK di Kota Medan yaitu : SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 9 sumber-sumber penting yang mendukung pelaksanaan program BSM dilihat berdasarkan SDM dan dana, dari segi

SDM sudah berstatus sarjana sehingga dapat dikatakan sudah mampu menunjang pelaksanaan Program. Kuantitas masing-masing pelaksana baik itu di Dinas Pendidikan maupun di Sekolah hanya berjumlah 1 orang saja, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan Program BSM.

Untuk masalah anggaran yang diterima oleh pihak implementor khusus untuk melaksanakan program BSM tidak ada dan fasilitas khusus yang disediakan untuk implementor dalam pelaksanaan program tidak memadai, sehingga fasilitas yang digunakan murni dari fasilitas yang sudah ada baik itu di Dinas Pendidikan Kota Medan maupun di setiap SMK tersebut.

### 3. Kecenderungan atau Tingkah Laku

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pada umumnya para pelaksana yang terlibat langsung dalam Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Medan khususnya pada SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 9 memiliki sikap atau tingkah laku yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### 4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin di Kota Medan didukung oleh efektifitas struktur pelaksana yang baik. Setiap pelaksana baik dari tingkat pusat sampai dengan sekolah mempunyai andil yang proporsional. Pembagian kerja berjalan baik sehingga para pelaksana mampu menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan. Keterlibatan semua komponen ini juga merupakan syarat

keberhasilan implementasi Pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin di Kota Medan.

5. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan, antara lain :

- a. Masih ada sebagian kecil pelaksana di tingkat sekolah yang belum benar-benar memahami alur dari pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin.
- b. Cara penyampaian pelaksanaan program BSM melalui guru-guru atau wali kelas yang akan mengajar dikelas tidak secara kontinyu dilakukan oleh sekolah.
- c. Dari segi kuantitas masing-masing pelaksana baik itu di Dinas Pendidikan maupun di Sekolah hanya berjumlah 1 orang saja, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan Program BSM.
- d. Anggaran yang diterima oleh pihak implementor khusus untuk melaksanakan program BSM tidak ada dan fasilitas khusus yang disediakan untuk implementor dalam pelaksanaan program tidak memadai, sehingga fasilitas yang digunakan murni dari fasilitas yang sudah ada baik itu di Dinas Pendidikan Kota Medan maupun di setiap SMK tersebut.
- e. Pengawasan kebijakan BSM hanya dilakukan satu kali saja oleh para implementor, dan bentuk pengawasan yang dilakukan hanya dengan penyebaran form yang harus diisi.
- f. Sistem penetapan sasaran penerima Program BSM masih lemah dimana ditemukan banyak penerima BSM yang bukan berasal dari keluarga/rumah

tangga miskin dan banyak siswa dari keluarga/rumah tangga miskin tidak menerima manfaat BSM.

## 5.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini tentang Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan (BSM SMK) di Kota Medan, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Pemahaman mengenai proses pelaksanaan program BSM harus terus ditingkatkan oleh setiap pelaksana dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin dan kontinyu. Jika ada peraturan yang berubah, maka sosialisasi harus segera dilakukan.
2. Diharapkan pihak pelaksana program dapat menambah jumlah personil yang ada sehingga mampu atau dapat menunjang pelaksanaan program BSM, sehingga Program BSM dapat berjalan dengan efektif dan efisien
3. Perlu adanya pengawasan yang intens terhadap pelaksanaan Program BSM tingkat SMK di Kota Medan seperti dari pihak pelaksana selalu memantau apakah program sudah dijalankan sebagaimana mestinya, tidak hanya melalui pengisian form saja tapi juga terjun langsung kelapangan melihat apakah program sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.
4. Andil yang proporsional harus dimiliki oleh setiap pelaksana program BSM baik dari tingkat pusat sampai dengan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, Leo.* 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Budi, Winarno.* 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
- Dunn, William.* 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik(edisi kedua) .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah .*1990. Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi.Malang : IKIP YA3 Malang
- Islamy, M Irfan.* 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan Soerhatono,* 2004. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kehan, Yeremias T..* 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava media
- Lilik, Mas Roro.* 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pustaka Cakra
- Moleong, Lexy.* 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant.* 2011. Publik Policy. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne.* 2008. Publik policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani,* 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
- Saebeni. Beni Ahmad.*2008. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia
- Subarsono, AG.* 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.* 2009. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif R & D. Bandung : Alfabeta

- Syafie, Inu Kencana.* 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Thoha, Miftah.* 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiadi A.* 2008. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi.* 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo

### **Peraturan**

- Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

### **Sumber Lain**

- Buku panduan pelaksanaan BSM Tingkat SMK Tahun 2013
- BPS, Maret 2014, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 28 Juta. <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>
- Kliping pendidikan pendidikan kaum marjinal Sept 2014 - Des 2014
- Harian Medan Bisnis, Target BSM Belum Tercapai. 2014